

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HIV (*Human immunodeficiency virus*) merupakan sebuah virus yang menyebabkan *AIDS (Acquired Immuno deficiency syndrome)*. *AIDS (acquired immuno deficiency syndrome)* merupakan suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. Virus HIV tersebut dapat ditularkan melalui hubungan seksual bebas atau disebut dengan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal / hubungan seksual melalui anus, dan oral/dengan mulut, serta dapat ditularkan akibat dari ketergantungan seseorang mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang akan berpengaruh terhadap tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial.

Dalam hal penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi, KPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan LSM untuk melakukan beberapa program untuk tercapainya tujuan dari PERDA No.4 Tahun 2015. Adapun maksud dan tujuannya sebagai berikut :

a. Maksud :

“Untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada populasi kunci serta populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta pemberian pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan.”

b. Tujuan

1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru
2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS
3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA
4. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit dan AIDS pada individu, keluarga, dan lingkungan.

Pemerintah kota Sukabumi juga membentuk sebuah lembaga pemerintah yang bersifat non struktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di daerah yang bekerja sama dengan Dinas kesehatan yakni adalah KPA (Komisi Penanggulangan AIDS). KPA (komisi penanggulangan AIDS) merupakan salah satu bentuk strategi penanggulangan HIV AIDS oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi beserta tugas, dan fungsi serta tata kerja KPA tersebut.

. Namun berdasarkan observasi awal. Peneliti menemukan beberapa fenomena yang terjadi tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di kota Sukabumi yakni sebagai berikut :

1. Tujuan Kebijakan yang terlalu ideal

Jika melihat tujuan dari PERDA No 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV AIDS kota Sukabumi poin 1 dan 2 yang mengemukakan :

- a. Menurunkan hingga *meniadakan* infeksi HIV baru.
- b. Menurunkan hingga *meniadakan* kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS.

Kata *meniadakan* dalam tujuan PERDA ini, poin 1 dan 2 merupakan sebuah tujuan yang idealis dalam artian tidak realistis. Karena virus HIV AIDS sampai dengan saat ini tidak memiliki obat untuk menyembuhkan dan dalam hal ini orang yang terkena virus HIV AIDS tidak memiliki kondisi atau tanda-tanda fisik yang berbeda dengan seseorang lainnya, maka akan sulit untuk membedakan seseorang yang terkena virus HIV atau tidak. Untuk mendeteksi seseorang terkena penyakit HIV AIDS harus dari kesadaran masyarakat untuk melakukan screening HIV setelah seseorang tersebut dianggap sudah melakukan hal-hal yang memang dapat berdampak terkena virus HIV tersebut. Alasan inilah yang merupakan terlalu idealisnya tujuan dari PERDA No 4 Tahun 2015, sehingga dalam pengimplementasiannya akan sulit tercapai.

2. Sumber Daya Financial

Dalam hal ini yang menjadi fenomena permasalahannya adalah sumber daya financial. Dinas Kesehatan membuat sebuah program

sosialisasi yang bekerja sama dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), namun sosialisasi yang dilakukan tidak intens, sedangkan virus HIV AIDS ini selain mengganggu kekebalan tubuh seseorang juga dapat merusak kondisi emosional yang akan berdampak pada keadaan sosial dirinya. Sosialisasi yang dilakukan tentu memerlukan dana yang membuat sosialisasi itu menjadi menarik untuk diminati oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di kota Sukabumi khususnya, ikut serta dalam hal sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini tentu akan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Karena berdasarkan observasi awal, fenomena yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjauhi hal-hal yang menjadi penyebab HIV AIDS serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening HIV AIDS setelah seseorang itu dianggap telah melakukan tindakan yang memang menjadi penyebab HIV AIDS seperti melakukan hubungan seksual dan mengkonsumsi NAPZA.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Tidak Berjalan Dengan Baik

Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV AIDS di kota Sukabumi yang dimaksud dengan organisasi formal adalah Dinas Kesehatan dan organisasi non formalnya adalah KPA (Komisi Penanggulangan AIDS). Namun karakteristik agen pelaksana dalam hal program ini belum mampu merangkul masyarakat kota Sukabumi. Berdasarkan observasi awal terjadi sebuah diskriminasi terhadap ODHA (orang dengan HIV AIDS). Diskriminasi yang dilakukan adalah

dalam hal segi sosial yang berpengaruh terhadap interaksi sosial yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya yang tentu hal ini juga akan berpengaruh terhadap lemahnya kualitas hidup ODHA yang menjadi tujuan dari PERDA No 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV AIDS di kota Sukabumi karena kurangnya rangkulan untuk merangkul ODHA tersebut.

4. Komunikasi antar Organisasi tidak Efektif

Dinas kesehatan mempunyai sebuah program tentang screening HIV AIDS yang harus dilaksanakan atau diterapkan di puskesmas yang ada di kota Sukabumi. Namun berdasarkan observasi awal bahwa ada puskesmas yang tidak menerapkan program screening HIV AIDS yaitu puskesmas Cikondang. Screening HIV ini mempunyai target terhadap ibu hamil. Ibu hamil yang memeriksa kandungan akan secara otomatis di cek HIV AIDS dengan tujuan jika ibu hamil itu terkena virus HIV maka akan dilakukan sebuah pengobatan intensif agar anak dalam kandungan tersebut tidak terkena virus HIV AIDS tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari PERDA No 4 Tahun 2015 mengenai penurunan atau peniadaan virus baru HIV AIDS.

5. Sikap Para Pelaksana kurang Tegas

Kebutuhan atau keinginan warga sukabumi mengenai HIV AIDS adalah dasar dari penyebab penularan terjangkitnya virus HIV AIDS. Dasar

tersebut adalah dengan memberantas tempat prostitusi, serta pengedaran obat-obat terlarang. Namun apa yang menjadi dasar kebutuhan serta keinginan warga kota sukabumi mengenai HIV dan AIDS tidak terlaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan 2018 dengan jumlah 1399 orang.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial.

Dalam hal ini implementor harus memperhatikan kondisi eksternal terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Karena lingkungan sosial yang ada di Sukabumi mengenai tempat prostitusi sudah menjadi hal biasa yang dilakukan karena kebutuhan ekonomi dari seseorang atau sekelompok orang. Hal ini akan berakibat terhadap penyebaran virus HIV yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan sebuah data yang didapat berdasarkan observasi awal, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1

NO	TAHUN	POSITIF HIV	KUMULATIF	KEMATIAN
1	2015	136 orang	963 orang	5 orang
2	2016	129 orang	1092 orang	10 orang
3	2017	160 orang	1252 orang	29 orang
4	2018	147 orang	1399 orang	2 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun orang yang positif HIV AIDS memiliki jumlah yang cukup signifikan yakni diatas 100 orang . Jika melihat dari tujuan yang sesuai dari PERDA No 4 Tahun 2015 nomor 1 yaitu “Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru” , maka

di lihat dari data yang ada, tujuan ini belum tercapai atau belum berjalan dengan baik.

Diantara tahun 2015-2018, tahun 2017 memiliki jumlah orang dengan positif HIV AIDS yang cukup tinggi dibanding tahun sebelum dan sesudahnya. Walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 akan tetapi jumlah yang terkena virus HIV 2018 jumlahnya masih diatas tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya salah satu tujuan yang sesuai dengan PERDA No 4 Tahun 2015

Dengan mengamati gejala atau fenomena yang terjadi , hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di kota Sukabumi harus mendapatkan perhatian dari semua pihak , khususnya untuk peneliti. Oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS. Peneliti menganggap penting dan tertarik untuk dijadikan bahan penelitian yakni bagaimana peran dari dinas kesehatan tersebut, sehingga mendorong peneliti memilih judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di kota Sukabumi”.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ”

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi?
2. Apa faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Upaya penanggulan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Secara teoritis mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai implementasi kebijakan
- b. Dalam wilayah akademis memperkaya khasanah kajian ilmu tentang implementasi kebijakan.

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Dapat mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi

- b. Dapat mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sukabumi